

Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan *SDGs* Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Strategies of the Jeneponto Regency Government in Implementing Village *SDGs* Policies to Achieve Sustainable Development Goals

Widyawati¹, Sulmiah², Dewi Sulfa Saguni³, Muhammad Hidayat Djabbari⁴

Administrasi Publik, FISIE Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara^{1,3,4}, Ilmu Administrasi Negara, FIS-H Universitas Negeri Makassar²

Email: widyawati@usn.ac.id

Naskah diterima tanggal 27 Mei 2024. Naskah direvisi tanggal 27 Juni 2024.

Naskah disetujui tanggal 30 Juni 2024.

Abstrak

Beberapa negara maju telah merumuskan solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, langkah ini diimplementasikan melalui kebijakan PDPT No.13/2020 tentang pembangunan desa berkelanjutan, yang mengadopsi 17 tujuan *SDGs*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk menjawab tujuan penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kekuatan dalam melakukan pendampingan pembuatan RPJMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah belum adanya regulasi lokal yang mengawal pelaksanaan *SDGs* Desa dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sesuai hasil penelitian dapat melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, meliputi penguatan pendampingan pembuatan RPJMDes, optimalisasi kegiatan pembinaan, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penyusunan regulasi *SDGs* Desa. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga relevan untuk pengembangan kebijakan dan aplikasi praktis di bidang pembangunan berkelanjutan, serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.

Keywords: Pembangunan berkelanjutan; Pemerintah; Strategi

Abstract

Several developed countries have formulated solutions to overcome the inequality of rural and urban development, which can encourage the achievement of sustainable development goals. In Indonesia, this step is implemented through PDTT policy No.13/2020 concerning sustainable village development, which adopts 17 SDGs goals. This research aims to analyze the strategy of the Jeneponto Regency Government in optimizing the implementation of sustainable village development policies to achieve sustainable development goals. Qualitative research methods were chosen to answer the objectives of this research. Data was obtained through interviews, literature studies, and observations, then analyzed using the Interactive Model Analysis technique. The results of the research show that the Jeneponto Regency Government has the strength to assist in the creation of the RPJMDes by the Community and Village Empowerment Service. However, the weaknesses found were the absence of local regulations that oversee the implementation of Village SDGs and a lack of coordination between regional and village governments. The Jeneponto Regency Government, according to the research results, can implement several strategies in implementing sustainable village development, including strengthening assistance in making RPJMDes, optimizing coaching activities, increasing coordination between OPDs, and preparing Village SDGs regulations. This research contributes to providing strategic guidance for local governments to support the success of sustainable village development, which positively impacts community welfare. Apart from that, this research is also relevant for policy development and practical application in the field of sustainable development and can be a reference for other regions in implementing similar policies.

Keywords: Sustainable development; Government; Strategic

PENDAHULUAN

Seperti yang telah diketahui, masalah ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan telah menjadi perhatian dunia ([Allawi & Al-Jazaeri, 2023](#); [Ghali & Ali, 2022](#); [Y. Li et al., 2022](#)). Beberapa negara maju telah membuat kebijakan transformasi pedesaan dan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruk dari ekspansi perkotaan terhadap daerah pedesaan. Solusi yang diterapkan merupakan langkah nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Misalnya, strategi "Revitalisasi Pedesaan" yang diusulkan oleh Pemerintah Tiongkok dan Prancis bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di pedesaan, dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini mendukung tujuan SDGs seperti mengakhiri kemiskinan (SDG 1), memastikan pendidikan berkualitas (SDG 4), mengurangi ketimpangan (SDG 10), dan mendukung komunitas dan kota yang berkelanjutan (SDG 11).([Allawi & Al-Jazaeri, 2023](#); [Y. Li et al., 2022](#); [Zang et al., 2020](#)).

Pemerintah Jepang membentuk "Desa Komperatif" sebagai bagian dari pembangunan kota terpadu yang bertujuan untuk menciptakan kota yang menggabungkan karakteristik pedesaan dan perkotaan, mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan SDGs untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9), serta keberlanjutan komunitas dan kota (SDG 11) ([Liu, 2018](#)).

Selanjutnya, Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris telah mendirikan "Central Village" sebagai upaya untuk membentuk jaringan pelayanan yang efektif di daerah pedesaan ([Allawi & Al-Jazaeri, 2023](#)), yang mendukung tujuan SDGs seperti kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan infrastruktur yang tangguh (SDG 9). Upaya-upaya tersebut secara keseluruhan mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tentang pembangunan desa berkelanjutan dengan tema "*Localizing SDGs*" sebagaimana diatur dalam Permendesa PDPTT No.13/2020 (Widyawati et al., 2022). Kebijakan pembangunan desa berkelanjutan ini mengadopsi 17 tujuan SDGs dengan 169 target dan 251 indikator ke dalam konteks lokal, dilengkapi dengan satu tujuan khusus SDGs Desa yang memberikan perhatian khusus pada pembangunan Desa ([Cole & Broadhurst, 2021](#); [Iskandar, 2020](#); [Nishitani et al., 2021](#); [Widyawati et al., 2022](#)).

Pendekatan pembangunan desa berkelanjutan Indonesia ini sangat holistik dan komprehensif, sebab mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Pemerintah desa diberdayakan dengan peran yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan, memastikan program yang dirancang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Selain itu, pendekatan pembangunan desa berkelanjutan tersebut mendorong inklusi sosial, memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua anggota masyarakat desa, termasuk kelompok rentan. Penggunaan teknologi dan inovasi juga didorong untuk mendukung pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi lokal.

Mengamati peran pemerintah desa dalam pembangunan desa berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa, dimana pemerintah desa harus menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang lebih sinergis, simultan, berkesinambungan, dan

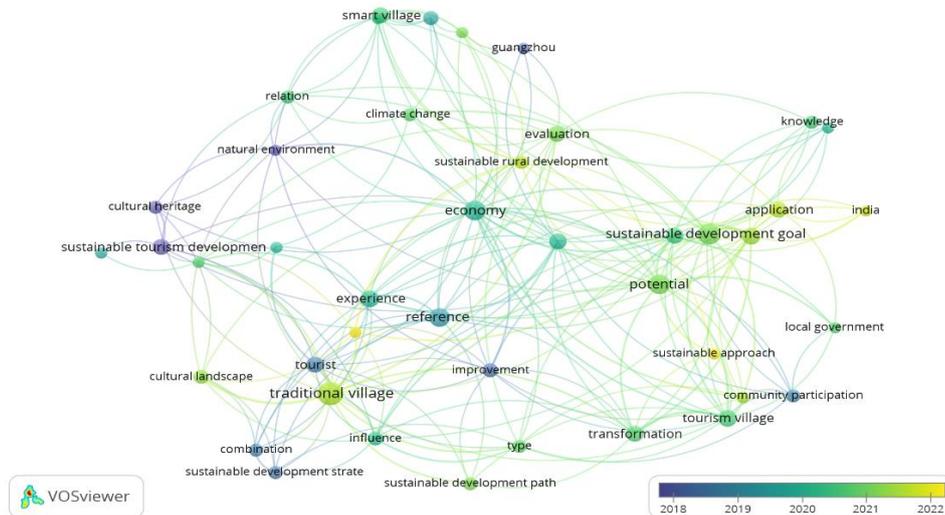
konsisten. Hal ini semakin diperjelas dari hasil penelitian terdahulu ([Widyawati et al., 2022](#)), bahwa hingga saat ini pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi terhadap kebijakan pembangunan desa, dikarenakan oleh beberapa masalah, diantaranya: perencanaan pembangunan desa yang belum menyesuaikan dengan tujuan SDGs Desa, rendahnya kapasitas aparat desa, Jumlah perangkat desa yang tidak sebanding dengan beban kerja, serta pengelolaan pembangunan desa hanya bergantung pada Dana Desa.

Berdasarkan pada permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di desa, pemerintah daerah perlu untuk menyusun dan menetapkan strategi pembangunan yang tepat agar pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional sesuai yang diharapkan, sebab kegagalan dalam pemilihan strategi dan pendekatan, proses perencanaan serta teknik pelaksanaan akan membuat kegagalan pelaksanaan pembangunan pedesaan, dan hal ini telah banyak terjadi di negara – negara berkembang ([Saleh, 2016](#); [Wang et al., 2020](#)).

Walaupun pada pelaksanaannya pembangunan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa, namun pemerintah daerah kabupaten masih memiliki kewenangan untuk mengawasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, pemerintah desa masih belum memiliki kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah Kabupaten memiliki tanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisa terhadap strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan.

Dari hasil penelusuran kajian literatur seperti yang terlihat pada gambar 1, terlihat tren kajian pembangunan desa berkelanjutan dari tahun 2018 – 20222 terbagi pada lima klaster utama diantaranya: klaster pertama membahas mengenai pemerintahan, evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, pembangunan pedesaan berkelanjutan, dan smart village. Klaster kedua terkait dengan partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi, pemerintah lokal, pendekatan berkelanjutan, transformasi, desa wisata, kesejahteraan masyarakat. Klaster ketiga membahas mengenai negara dan kota yang telah melaksanakan pembangunan desa berkelanjutan seperti Cina, India, Taiwan dan Guangzhou. Klaster keempat lebih mengarah mengenai hubungan kerjasama dan kolaborasi stakeholder dalam

pelaksanaan pembangunan. Terakhir klaster kelima membahas tentang pembangunan lokal dalam pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Hasil Visualisasi Vosviewer, 2023

Gambar 1. Tren Kajian Pembangunan Desa Berkelanjutan

Dari kelima kluster kajian di atas menunjukkan bahwa kajian pembangunan desa berkelanjutan mengarah pada kebijakan dan inovasi pembangunan, pembangunan berbasis budaya lokal, kerjasama dan koordinasi pemerintah dalam pembangunan, serta pembangunan partisipatif. Penelitian ini memfokuskan kepada strategi pada pembangunan desa. Efektifitas strategi diperlukan untuk menemukan metode pembangunan pedesaan berkelanjutan yang lebih komprehensif, mengingat pembangunan desa merupakan proses yang kompleks karena tumpang tindih dengan aspek ekonomi dan sosial budaya, yang memerlukan terbangunnya sistem perencanaan yang lebih efektif dan terpadu untuk menghasilkan pedesaan yang stabil, berkelanjutan, sehat, dan terpadu ([Allawi & Al-Jazaeri, 2023](#); [Y. Li et al., 2019](#)).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Strategi

Dalam merumuskan konsep strategi yang digunakan pada kajian ini, penulis mengacu pada kajian ilmu manajemen strategis. Strategi merupakan upaya atau cara pemimpin dalam merumuskan perencanaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Singkatnya, strategi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan jangka waktu yang panjang, ([Ben-David et al., 2010](#)). Strategi memiliki sifat dasar dan fundamental yang

digunakan organisasi untuk mencapai tujuan, termasuk penentuan sasaran yang digunakan untuk menghitung rintangan lingkungan yang akan dihadapi organisasi.

Secara esensial, strategi dimaksudkan sebagai pencapaian tujuan dalam jangka waktu yang panjang (*long-term objectives*). Akan tetapi, dalam pencapaian tujuan organisasi, strategi bukanlah peta jalan yang berfungsi untuk menunjukkan arah, namun hanya berfungsi sebagai penentu taktik operasional agar organisasi dapat mencapai tujuan. Strategi adalah bagian dari sebuah rencana organisasi dengan skala yang besar, dan memiliki orientasi masa depan, yang berguna dalam melakukan interaksi dengan kondisi yang ada agar tujuan dari organisasi tercapai (Perach & Robinson, 2011).

Dari pandangan (Rangkuti, 2005), strategi dipahami sebagai rencana induk organisasi yang bersifat komprehensif, yang menjelaskan cara suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan berdasarkan misi. Strategi adalah sumber motivasi pimpinan, yang memberikan keuntungan dari segala aktivitas organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi juga dapat dipandang sebagai tindakan potensial yang dibutuhkan oleh organisasi dari hasil keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi. Melalui strategi, organisasi memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan jangka panjang (paling sedikit lima tahun) ([David Fred & Forest, 2016](#)). Strategi memiliki konsekuensi multidimensi dan multifungsi, serta membutuhkan pertimbangan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dari organisasi.

Dalam merumuskan strategi yang tepat, terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan untuk dilakukan ([Ben-David et al., 2010](#)). Tahapan pertama atau yang disebut tahapan input, terdiri dari matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI). Matriks EFE dipergunakan oleh para pembuat strategi untuk melakukan ringkasan dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan faktor eksternal organisasi seperti: faktor sosial, ekonomi, demografi, budaya, politik, lingkungan, persaingan, teknologi dan hukum. Sedangkan matriks EFI dipergunakan oleh perencana strategi dalam organisasi untuk melakukan ringkasan dan mengevaluasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Tahap kedua dalam penentuan strategi disebut tahap analisis. Tahap ini berfokus pada upaya untuk melahirkan strategi alternative. Teknik pada tahapan kedua ini yaitu menggunakan matriks SWOT (*Strengths-Weaknesses- Opportunities-Threats*).

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai pelaksanaan pembangunan yang menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mengupayakan kemakmuran jangka panjang dan kesejahteraan universal ([Ozturk et al., 2024](#)). Pembangunan berkelanjutan menguraikan 17 tujuan, yang telah merangkum aspirasi banyak orang-orang dunia, seperti seperti mengakhiri kemiskinan ekstrem, memastikan setiap orang memiliki akses terhadap makanan, air bersih dan layanan kesehatan, menciptakan sistem energi dan kota yang berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan yang sehat ([Wood et al., 2024](#)).

Menurut ([Iskandar, 2020](#)) pembangunan berkelanjutan berpedoman pada lima prinsip – prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Prinsip tersebut dikenal dengan 5 P yang terdiri dari: 1) *People* (manusia), pada prinsip manusia ditempatkan sebagai perhatian utama dalam pembangunan. Seluruh manusia pada prinsip ini harus dipastikan dapat memenuhi kebutuhannya, serta mendapatkan lingkungan yang sehat; 2) *Planet* (Bumi). Prinsip ini mengarahkan pada agenda perlindungan terhadap bumi; 3) *Prosperity* (kesejahteraan). Prinsip menekankan pada terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia, manusia hidup layak dan Sejahtera; 4) *Peace* (perdamaian). Prinsip ini mengarahkan pada perdamaian dan keadilan, serta terbangunnya masyarakat inklusif, yang bebas dari ketakutan dan kekerasan; 5) *Partnership* atau kemitraan, penekanan pada strategi pembangunan yang dilaksanakan secara kolaborasi, mobilisasi, dan kemitraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai November 2023 ini berlokasi di seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto. Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan demi mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah kabupaten Jeneponto memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan di desa.

Agar tujuan peneliti dalam penelitian ini dapat tercapai maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan

tersebut dipilih, sebab peneliti memiliki anggapan bahwa metode kualitatif dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menggambarkan pandangan, persepsi secara menyeluruh yang berhubungan dengan data yang diperoleh di lapangan ([Creswell, 2019](#)), dan dengan pendekatan studi kasus peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih otentik mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Data utama dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan tidak terstruktur. Untuk memperkuat hasil wawancara peneliti juga menggunakan data yang bersumber dari literatur, seperti laporan realisasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto, laporan realisasi pembangunan Desa Berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto, dokumen *workshop* sinkronisasi RPJMD Kabupaten Jeneponto dengan Rencana pembangunan SDGs Desa, serta artikel-artikel yang terkait dengan masalah penelitian. Tidak hanya itu, data peneliti juga diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam menentukan informan, peneliti memperhatikan beberapa karakter yang diperlukan sesuai dengan masalah penelitian, sehingga ketika melakukan wawancara, informan dapat memberikan informasi yang akurat dan menambah informasi yang belum diketahui sebelumnya oleh peneliti. Berdasarkan pada karakteristik tersebut, maka informan penelitian ini yaitu orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, yang terdiri dari: Perangkat Desa, Bupati/Wakil Bupati Jeneponto, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, dilakukan analisa dengan menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh ([Miles et al., 2018](#)) yaitu *Interactive Model Analysis*. Dimana data yang telah dikumpulkan direduksi, yaitu peneliti melakukan pengelompokan data sesuai dengan dimensi untuk menganalisis strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan Desa Berkelanjutan. Data yang dianggap relevan akan disimpan, sedangkan yang tidak relevan akan dibuang oleh peneliti. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan gambar.

Setelah data disajikan, dan dianalisis dengan membandingkan dari berbagai literatur, peneliti kemudian menyusun kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, peneliti tidak

meringkas keseluruhan hasil penelitian, tetapi peneliti memaknai permasalahan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan. Sebelumnya data juga diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang peneliti lakukan terdiri dari triangulasi metode, sumber dan triangulasi teori. Pada triangulasi metode, data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil observasi untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk triangulasi sumber, dilakukan peneliti dengan cara, informasi yang di dapatkan kemudian digali kebenarannya dengan mengumpulkan berbagai sumber lainnya, berupa kajian terdahulu, kebijakan- kebijakan dan arsip yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Selanjutnya triangulasi teori, peneliti lakukan untuk menguatkan pendapat penelitian mengenai data yang diperoleh dengan mengumpulkan beberapa teori yang relevan.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai tahapan input (evaluasi faktor internal (EFE) dan faktor eksternal (EFI)), dan; tahapan analisis (Matriks SWOT), yang didasari oleh hasil penelitian di lapangan.

A. Tahapan Input

Bagian ini menguraikan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, yang kemudian dibuatkan analisis matriks dari evaluasi faktor internal (matriks EFE) dan faktor eksternal (matriks EFI).

1. Kekuatan

Pada bagian ini peneliti menguraikan mengenai hal-hal positif yang ada pada organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan. Kekuatan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang menunjang peningkatan kinerja organisasi, pelaksanaan kegiatan atau program yang memberikan manfaat bagi organisasi dan lingkungannya ([Allawi & Al-Jazaeri, 2023](#)). Penelitian pada aspek kekuatan yang terdapat pada organisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, bertujuan untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh organisasi dalam mengatasi kelemahan dan mencegah ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto.

Jika mengamati indikator pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan, maka terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut. Akan tetapi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jeneponto merupakan OPD yang bertanggung jawab dalam pencapaian target tujuan pembangunan desa berkelanjutan. Sesuai informasi di lapangan diketahui bahwa DPMD Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan di desa memiliki tiga fungsi yaitu: 1) Melakukan pemberdayaan; 2) Melakukan pembinaan, dan; 3) Melaksanakan pengawasan.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Jeneponto yaitu mendorong pengembangan kapasitas Lembaga yang ada di desa, seperti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan harapan pemerintah desa, melalui pemberian pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa. Fungsi pembinaan oleh DPMD Kabupaten Jeneponto diwujudkan dengan melakukan kunjungan langsung ke Desa untuk melihat proses kegiatan di Desa termasuk proses pelayanan, kedisiplinan Perangkat Desa, dan memantau pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selain itu, DPMD Kabupaten Jeneponto bekerja sama dengan Tenaga Ahli P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) juga melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Selanjutnya untuk fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, DPMD Kabupaten Jeneponto melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPMD Kabupaten Jeneponto dibantu oleh beberapa OPD. Keterlibatan beberapa OPD dalam melakukan evaluasi APBDes, berdasarkan informasi dari informan dikarenakan OPD Kabupaten Jeneponto dan Pemerintah Daerah memiliki pemikiran bahwa ketercapaian pelaksanaan pembangunan SDGs Desa di Kabupaten Jeneponto menjadi tanggung jawab bersama. Pembentukan Tim Evaluasi sendiri diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto, dan untuk melegalkan keterlibatan OPD lainnya dalam evaluasi APBDes, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/227/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Anggota Tim Pelaksana Evaluasi APBDes disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Tim Pelaksana Evaluasi APBDes Kabupaten Jeneponto

No	Jabatan	Pelaksana
1	Pengarah	1. Bupati Kabupaten Jeneponto; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto; 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Jeneponto.
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
3	Ketua	Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
5	Anggota	1. Inspektorat; 2. Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto; 3. Kepala BPKAD kabupaten Jeneponto; 4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto; 5. Kepala Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto; 6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto; 7. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
6	Unsur Terkait Lainnya	1. Camat Se-Kabupaten Jeneponto; 2. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD).

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto, 2023

Kegiatan evaluasi APBDes yang dilakukan oleh tim di atas, sesuai informasi informan dilaksanakan setiap bulan Februari atau awal bulan Maret. Hal – hal yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yaitu melakukan pemeriksaan dan penetapan rancangan APBDes, ketika para tim menganggap terdapat beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa dan indikator ketercapaian SDGs Desa, maka Tim Evaluasi akan memberikan saran untuk melakukan penggantian terhadap kegiatan yang lebih prioritas sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Desa dan RPJMDes Desa.

Temuan penelitian ini juga menemukan bahwa Bappeda Kabupaten Jeneponto untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan telah mengadakan kegiatan pendampingan sinkronisasi *Road Map* SDGs Desa dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten Jeneponto. Sasaran pendampingan tersebut yaitu kepala desa dan Kepala Urusan Perencanaan Desa. Menurut informan sinkronisasi ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan SDGs Desa dapat mendukung ketercapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto dan Pembangunan berkelanjutan Nasional. Berikut sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SDGs Desa.

Tabel 2.
Pelokalan SDGs ke TPB ke TPB Desa / SDGs Desa

Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	SDGs	TPB	SDGs Desa
1	<i>End poverty in all its form everywhere</i>	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	Desa Tanpa Kemiskinan
2	<i>End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable</i>	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Desa tanpa kelaparan
3	<i>Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages</i>	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Desa sehat dan sejahtera
4	<i>Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all</i>	Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Pendidikan desa berkualitas
5	<i>Achieve gender quality and empower all women and girls</i>	Mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Keterlibatan Perempuan Desa
6	<i>Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all</i>	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Desa layak air bersih dan sanitasi
7	<i>Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all</i>	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	Desa berenergi bersih dan terbarukan
8	<i>Promote sustained, inclusive, sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all</i>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Pertumbuhan ekonomi desa merata
9	<i>Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation</i>	Membangun infrastruktu yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10	<i>Reduce inequality within and among countries</i>	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Desa tanpa kesenjangan
11	<i>Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable</i>	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
12	<i>Ensure sustainable consumption and production patterns</i>	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13	<i>Take urgent action to combat climate change and its impacts</i>	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Desa tanggap perubahan iklim
14	<i>Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development</i>	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Desa peduli lingkungan laut
15	<i>Protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss</i>	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelolah hutan secara Lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Desa peduli lingkungan darat
16	<i>Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to</i>	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses	Desa damai berkeadilan

	<i>justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all level</i>	keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	
17	<i>Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development</i>	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kemitraan untuk pembangunan desa
18	-	-	Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif

Sumber: Bappeda Kabupaten Jeneponto, 2023

Tabel 3.
Sinkronisasi Indikator TPB RPJMD dan SDGs Desa

No	Jml indikator TPB RPJMD Kab. Jeneponto	Jml indikator yang Diselaraskan dengan SDGs Desa	Uraian Indikator yang Diselaraskan dengan SDGs Desa	Tujuan SDGs
1	Prioritas Pertama (TPB yang beririsan dengan SPM, IKU dan IKK) : berjumlah 19 indikator	14 indikator	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1
			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	
			3. Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat	
			4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	3
			5. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) cara modern	
			6. Angka kelahiran pada Perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	
			7. Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	4
			8. Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat.	
			9. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	
			10. Angka partisipasi Kasar (APK) Pendidikan anak usia dini (PAUD)	6
			11. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	
			12. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 25-59 tahun	
			13. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	6
			14. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	
2	Prioritas Kedua (TPB yang beririsan dengan SPM) : berjumlah 9 indikator	2 indikator	1. Proporsi sekolah dengan akses ke: a) listrik; b) internet untuk tujuan pengajaran; c) komputer untuk tujuan pengajaran; d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas; e) air minum layak; f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin; g) fasilitas cuci tangan (terdiri atas air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	4

			2. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industry, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	6
3	Prioritas Kedua (TPB yang beririsan dengan IKU dan IKK) : berjumlah 18 indikator	11 indikator	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan. 3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai, dan tingkat konsumsi ikan 4. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun 5. Angka kelahiran pada Perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 6. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 7. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 8. Persentase sampah perkotaan yang tertangani 9. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan Perempuan 10. Persentase keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	1 2 5 8 10 11 16
4	Prioritas Kedua (TPB yang tidak beririsan dengan SPM, IKU dan IKK) : berjumlah 25 indikator	14 indikator	1. Proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN bidang Kesehatan. 2. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan 3. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) 4. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 5. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 6. Proporsi Perempuan dewasa dan anak Perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir 7. Proporsi Perempuan yang berada di posisi mmanagerial 8. Proporsi Perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kotrasepsi, dan layanan Kesehatan reproduksi. 9. Persentase tenaga kerja formal 10. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	1 3 4 5 8

11. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.00 penduduk dewasa	
12. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	11
13. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	16
14. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan Publik Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi /Kabupaten Kota)	

Sumber: Bappeda kabupaten Jeneponto, 2023

Berdasarkan beberapa indikator yang disinkronisasikan ke SDGs Desa seperti yang terlihat pada tabel 4, menurut informan telah terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan kebijakan SDGs Desa, sehingga hal ini lebih mempermudah dalam pemerintah desa dalam mencapai target indicator SDGs desa yang sesuai dengan TPB Kabupaten Jeneponto.

2. Kelemahan

Sesuai dengan definisinya, kelemahan merupakan kendala yang dapat menghalangi atau faktor penghambat kinerja organisasi ([Ghali & Ali, 2022](#)), maka pada penelitian ini, kelemahan yang diuraikan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan SDGs Desa hingga saat ini masih berpedoman dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum membuat kebijakan turunan terkait dengan pelaksanaan pembangunan SDGs Desa. Sehingga hal ini berdampak pada sulitnya pemerintah desa dan DPMD Kabupaten Jeneponto dalam menyusun indikator pelaksanaan pembangunan SDGs Desa di Kabupaten Jeneponto. Selain itu hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum melakukan koordinasi dengan para pemerintah desa. Menurut salah satu informan, koordinasi dalam pelaksanaan SDGs Desa sangat perlu untuk dilakukan, sebab pemerintah desa masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam melaksanakan seluruh tujuan SDGs Desa yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut informan mengungkapkan bahwa, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) akan sangat membantu ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan baik tingkat Kabupaten dan Desa, sebab tujuan dari pembangunan tersebut memiliki fokus yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan pula bahwa, ketercapaian 18 tujuan SDGs Desa di Kabupaten Jeneponto hanya sekitar 41,14%. Angka ini menunjukkan bahwa SDGs Desa di Kabupaten Jeneponto belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dari data yang diperoleh juga tidak menjabarkan dengan jelas pengukuran ketercapaian indikator dari setiap tujuan yang ada. Pemerintah desa juga tidak memiliki rencana aksi untuk mencapai setiap indikator.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memberikan informasi Desa belum menjelaskan capaian yang akan dicapai tiap tahunnya dalam menjalankan SDGs Desa. Berdasarkan dari penjelasan informan, hal ini terjadi dikarenakan penetapan regulasi SDGs Desa tidak sesuai dengan perodesasi RPJMDes, sehingga beberapa desa yang ada di Kabupaten Jeneponto tidak memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sejalan dengan tujuan SDGs Desa, sehingga dalam menyusun laporan ketercapaian SDGs Desa, DPMD Kabupaten Jeneponto hanya memperhatikan program kerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemerintah desa selama ini, yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan 18 tujuan SDGs Desa, dan disimpulkan seperti yang terlihat pada tabel 5 di atas.

Dari hasil penelitian, ditemukan informasi bahwa kendala dalam pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Jeneponto juga dipengaruhi oleh tidak adanya *leading sector* yang mampu mendorong pertumbuhan untuk sektor lainnya. DPMD Kabupaten Jeneponto yang diharapkan dapat membantu pemerintah Desa dalam menentukan *leading sector* dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, justru tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dari pengakuan informan yang merupakan bagian dari DPMD Kabupaten Jeneponto, tidak berjalannya fungsi DPMD dengan baik dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pembangunan desa.

Sumber daya manusia (SDM) di DPMD Kabupaten Jeneponto berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Sub Bagian, serta 7 orang pejabat fungsional. Untuk melaksanakan tugas pengawasan pembangunan dilakukan oleh Bidang Pemerintahan Desa, sehingga untuk pengawasan hanya dilakukan oleh 4 orang (1 kepala Bidang dan 3 kepala seksi), hal ini tentu tidak sebanding dengan banyaknya desa yang harus diawasi di Kabupaten Jeneponto, yakni 114 Desa.

3. Peluang

Peluang merupakan kondisi yang dapat mengatasi kesenjangan dan mencapai tujuan ([Zang et al., 2020](#)). Hal ini berkaitan dengan hal-hal positif yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat. Terlihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023, di beberapa desa yang ada di Kabupaten Jeneponto, umumnya memusatkan perhatian terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penelitian ini, diketahui terdapat pemerintah desa dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, memberikan bantuan siswa tidak mampu, dan bantuan penyelesaian studi untuk mahasiswa. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa lainnya yang mayoritas hanya melakukan perbaikan gedung TK/Paud dan Sekolah Dasar. Lebih lanjut, dari informasi yang diperoleh, walaupun rencana pembangunan desa belum sepenuhnya memenuhi ke 18 indikator SDGs Desa, namun rencana pembangunan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang saat ini dialami oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Dimana menurut informan, ketika rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan dengan baik maka akan menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas Pendidikan, p kualitas kesehatan, peningkatan peran Perempuan, dan peningkatan infrastruktur desa.

4. Ancaman

Ancaman merupakan situasi di luar organisasi yang berpotensi menjadi penghalang dalam mencapai tujuan ([Liu, 2018](#); [Zang et al., 2020](#)). Ancaman pada penelitian ini, yaitu segala sesuatu yang berada di luar kelembagaan Desa yang memberikan pengaruh negative terhadap pelaksanaan SDGs Desa. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa desa di Kabupaten Jeneponto juga dipengaruhi oleh nilai-nilai politisi. Perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, tetapi dipengaruhi pula oleh kebutuhan atau kepentingan pendukung kepala desa saat pemilihan. Kekuatan kepentingan tersebut justru memiliki pengaruh yang besar dalam penetapan perencanaan pembangunan desa, sebab hal tersebut dijadikan Kepala Desa terpilih sebagai cara untuk mempertahankan kekuatan untuk

pemilihan selanjutnya. Selain itu, sesuai dengan informasi yang diperoleh, kepala desa tidak memiliki *mindset* terhadap kemajuan pembangunan,

Lebih lanjut informasi dari informan, juga mengungkapkan bahwa segala masukan perbaikan terhadap rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak memiliki arti ketika hal tersebut tidak menguntungkan kepala desa dan kelompok kepentingannya. Setelah diberikan waktu untuk perbaikan, mereka akan mengumpulkan diwaktu yang mendesak dengan draf yang sama tanpa perbaikan, sehingga pemerintah Kabupaten Jeneponto terpaksa menetapkan perencanaan pembangunan yang ada pada saat itu.

Merujuk pada Undang-Undang No. 6/2014, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, akan tetapi hak otonomi tersebut tidak sepenuhnya diberikan. Berdasarkan informasi di lapangan, masih terdapat campur tangan pemerintah dalam pembangunan desa, khususnya intervensi pada penggunaan anggaran. Dimana sumber keuangan terbesar desa saat ini yaitu Dana Desa, pengelolaan masih sepenuhnya mengacu pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Menurut salah satu informan, desa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya desa, akan sangat sulit mencapai pembangunan desa berkelanjutan dengan kondisi pengelolaan dana desa yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan anggaran telah memiliki posnya masing-masing, sehingga desa tidak memiliki kemampuan lebih untuk melakukan inovasi dan berkreasi dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

5. Matriks EFI dan EFE

Analisis matriks IFE dan EFE pada penelitian mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan Desa Berkelanjutan, dibuat berdasarkan hasil identifikasi faktor – faktor strategis internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Setelah faktor-faktor strategis tersebut diidentifikasi, dilakukanlah pemberian bobot dan *rating* pada faktor-faktor strategis yang telah ada. Hal ini tentunya dilakukan dengan menggunakan metode *paired comparison*. Pemberian bobot dilakukan dengan membandingkan setiap faktor strategis, agar dapat diketahui tingkat kepentingan pada setiap faktor-faktor strategis. Sedangkan pemberian *rating* dilakukan dengan cara

memperhatikan respon apakah bernilai tinggi atau rendah terhadap faktor-faktor strategis. Pemberian bobot dan *rating* dilakukan oleh responden, yang selanjutnya, dirata-ratakan untuk mendapatkan bobot dan *rating* dengan total bobot sama dengan 1 (satu).

a. Analisis Matriks Internal

Pada bagian ini disajikan matriks yang berisi rangkuman dan evaluasi kekuatan dan kelemahan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan Desa Berkelanjutan, Hasil analisis identifikasi faktor-faktor internal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Matriks EFI

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Total
KEKUATAN			
A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mitra kerja Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melaksanakan pembinaan dan pendampingan pembuatan RPJMDes.	0,206	3,85	0.793
B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto melakukan kegiatan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa	0,153	2,85	0,436
C. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto menyakini bahwa pembangunan desa berkelanjutan menjadi tanggung jawab Bersama	0,137	2,57	0.352
D. Terdapat TIM Evaluasi APBDes	0,137	2,57	0.352
E. Bappeda Kabupaten Jeneponto memberikan pendampingan sinkronisasi <i>Road Map</i> SDGs Desa dengan dokumen perencanaan Kabupaten Jeneponto	0,191	3,57	0.681
F. Pemerintah Kab. Jeneponto telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendorong keberhasilan pelaksanaan DGS Desa	0,176	3.29	0.576
	1	18.7	3,19
KELEMAHAN			
A. Belum ada regulasi pada tingkat lokal yang mengawal pelaksanaan SDGs Desa	0,149	2	0,298
B. Belum ada koordinasi antara Pemerintah Daeran dan Pemerintah Desa terkait SDGs Desa	0,128	1,71	0,219

C. Pengukuran indikator ketercapaian SDGs Desa kurang jelas	0,085	1,14	0,097
D. Tidak ada rencana aksi dalam pencapaian SDGs Desa	0,117	1,57	0,184
E. RPJMDes belum sejalan dengan tujuan SDGs Desa	0,128	1,71	0,219
F. Periodesasi RPJMDes dengan Regulasi SDGs Desa tidak berkesesuaian	0,117	1,57	0,184
G. Tidak ada <i>Leading Sector</i> yang mampu mendorong pembangunan sektor lainnya.	0,138	1,86	0,257
H. Sumber daya manusia terbatas dalam melakukan pengawasan pembangunan desa	0,138	1,86	0,257
	1	12,28	1,715

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan pada tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa kekautan utama Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan yaitu adanya kegiatan pendampingan pembuatan RPJMDes yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mitra kerja Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan memiliki kelemahan utama yaitu belum adanya regulasi pada tingkat lokal yang mengawal pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Jeneponto.

b. Analisis Matriks Eksternal

Matriks EFE digunakan untuk merangkum peluang dan ancaman. Cara untuk melakukan analisis matriks EFE, sama halnya dengan melakukan analisis matriks EFI, yaitu melakukan perhitungan pada bobot dan pemberian rating di setiap faktor. Hasil dari identifikasi faktor-faktor eksternal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Matriks EFE

\	Bobot	Rating	Total
PELUANG			
A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	0,207	2,43	0,503
B. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	0,183	2,14	0,392
C. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	0,195	2,29	0,446
D. Peran Perempuan semakin meningkat dalam pembangunan	0,171	2	0,342
E. Peningkatan infrastruktur	0,244	2,86	0,698
	1	11,72	2,381

ANCAMAN				
A.	Intervensi pemerintah pusat terhadap penggunaan anggaran pembangunan	0,410	2,28	0,799
B.	Nilai politis dalam pelaksanaan pembangunan di desa	0,231	1,28	0,250
C.	Mindset Kepala Desa	0,359	2	0,596
		1	9	2,34

Sumber: Olahan Penulis, 2023

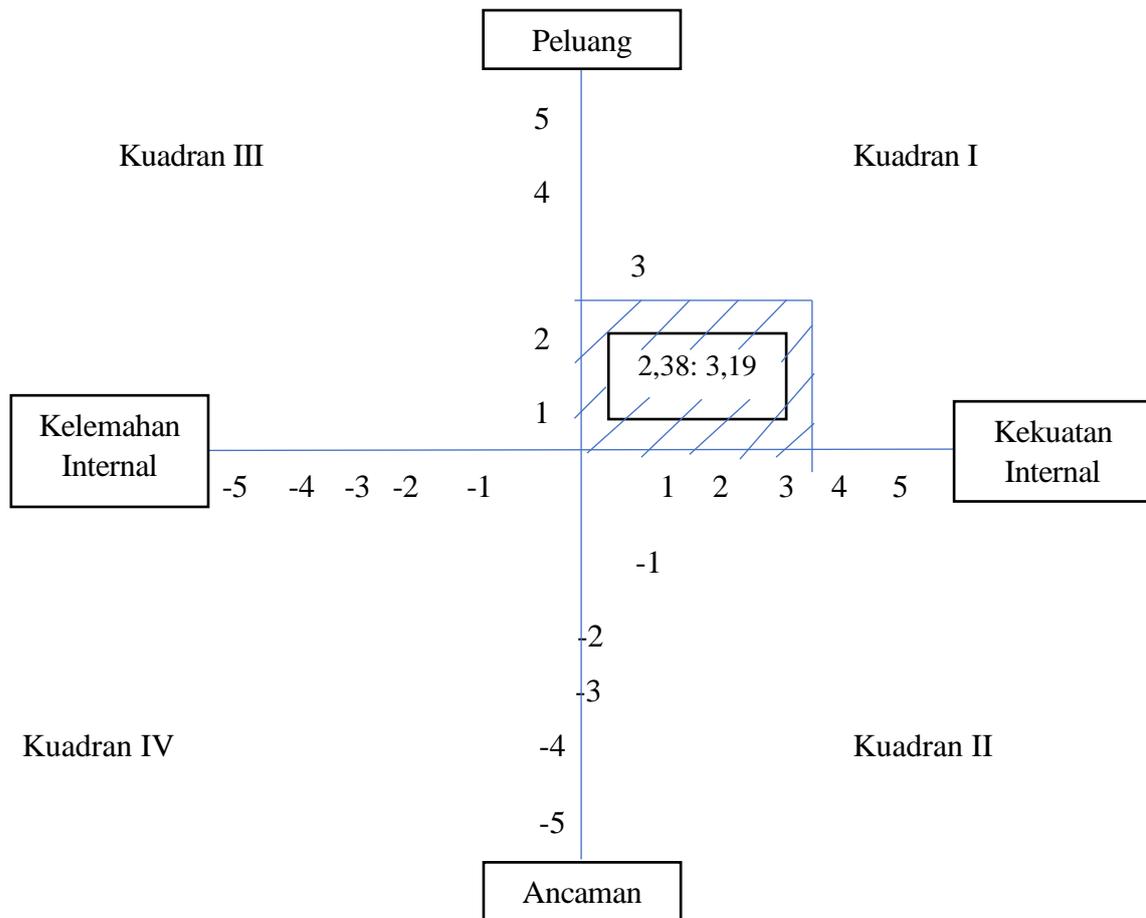
Pada tabel 5 di atas, terlihat bahwa peluang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan yaitu, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kekhawatiran Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan atau yang menjadi ancaman yaitu adanya intervensi pemerintah pusat terhadap anggaran pembangunan.

B. Tahapan Analisis (Analisis SWOT)

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka yang dilakukan selanjutnya yaitu membuat analisis SWOT, yang bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan.

Langkah pertama dalam melakukan analisis SWOT yaitu membuat kuadran SWOT yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan. Untuk penentuan letak titik pada kuadran, berpedoman pada matriks IFE dan EFE yang telah disajikan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai kuadran SWOT dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan gambar kuadran (gambar1) dan penjelasan kuadran menurut (Rangkuti F. , 2013), diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto berada pada Kuadran 1, yang berarti strategi yang harus diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, (Rangkuti F. , 2013). Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Jeneponto berada pada situasi yang menguntungkan, yaitu memiliki kekuatan dan peluang, sehingga pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan kekuatan internal yang dimiliki dapat menggunakan peluang yang ada agar pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan optimal sehingga mendukung terjadinya percepatan pencapaian tujuan pembangunan.



Gambar 1. Kuadran SWOT
Sumber: Olahan Penulis 2023

Langkah selanjutnya yaitu membuat matriks SWOT, dengan matriks ini akan lebih mempermudah untuk menginterpretasikan berbagai strategi terkair dengan penggunaan kekuatan, perbaikan kelemahan, pemanfaatan peluang pengawasan serta mengatasi ancaman. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Matriks SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mitra kerja Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melaksanakan pembinaan dan pendampingan pembuatan RPJMDes. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto melakukan kegiatan, pembinaan, 	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada regulasi pada tingkat lokal yang mengawal pelaksanaan SDGs Desa. Belum ada Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terkait SDGs Desa

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>pemberdayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto menyakini bahwa pembangunan desa berkelanjutan menjadi tanggung jawab Bersama 4. Terdapat Tim Evaluasi APBDes 5. Bappeda Kabupaten Jeneponto memberikan pendampingan sinkronisasi Road Maps SDGs Desa dengan dokumen perencanaan kabupaten Jeneponto 6. Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendorong keberhasilan pelaksanaan SDGs Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengukuran indikator ketercapaian SDGs Desa kurang jelas. 4. Tidak ada rencana aksi dalam pencapaian SDGs desa 5. RPJMDes belum sejalan dengan Tujuan SDGs Desa 6. Periodesasi RPJMDes dengan Regulasi SDGs Desa tidak berkesesuaian. 7. Tidak ada <i>Leading Sector</i> yang mampu mendorong pembangunan sektor lainnya. 8. Sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan pengawasan pembangunan desa
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat 3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 4. Peran Perempuan semakin meningkat dalam pembangunan . 5. Peningkatan infrastruktur 	<p>Strategi S – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pendampingan Pembuatan RPJMDes. 2. Optimalisasi Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan pengawasan. 3. Partisipasi Aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 4. Sinkronisasi Road Map SDGs Desa dengan RPJMD Kab. Jeneponto. 5. Penguatan Kegiatan yang Mendorong SDGs Desa. 	<p>Strategi W - O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan dan Penyusunan Regulasi SDGs Desa. 2. Pengembangan sistem pengukuran Indikator SDGs Desa 3. Penetapan Leading Sector untuk Pendorong Perubahan. 4. Penyelarasan Periodesasi RPJMDes dengan Regulasi SDGs Desa. 5. Peningkatan Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Desa 6. Perumusan Rencana Aksi SDGS Desa. 7. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
<p>Ancaman(T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi pemerintah terhadap penggunaan anggaran pembangunan 2. Nilai politis dalam pelaksanaan pembangunan di desa 3. Mindset Kepala Desa. 	<p>Stretegi S – T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Komunikasi Terbuka. 2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa. 3. Pengembangan BUMDes 4. Optimalisasi pengelolaan kekayaan Aset Desa 	<p>Strategi W – T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem pengawasan transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran pembangunan. 2. Menciptakan mekanisme independen untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan di desa.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi perencanaan strategi bagi pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan SDGs Desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang dipaparkan berikut ini:

Pemanfaatan Kekuatan terhadap Peluang dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kekuatan dan peluang yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pembangunan desa berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Penguatan pendampingan RPJMDes dapat dilakukan sebagai strategi pertama untuk memanfaatkan kekuatan terhadap peluang yang ada. Penguatan pendampingan dalam pembuatan RPJMDes merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan desa terstruktur dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Purwanto et al, 2020). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat memanfaatkan kekuatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kualitas pendampingan. Pendampingan ini harus mendorong seluruh pemerintah desa untuk mengintegrasikan isu-isu keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peranan perempuan ke dalam RPJMDes. Hal ini penting untuk memastikan perencanaan desa mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Jeneponto secara menyeluruh.

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto yakni optimalisasi kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan. Dimana pada strategi ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus menekankan pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan, dan memastikan inisiasi pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pertimbangan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dianggap penting dalam hal ini, dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar utama yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan dari program-program pembangunan. Sedangkan pentingnya kualitas pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan risiko pembangunan yang tidak dikelola dengan baik, dan menentukan pula

kapasitas mereka dalam pengambilan resiko dalam pelaksanaan pembangunan ([Beata et al., 2023](#); X. Li et al., 2023).

Meningkatkan partisipasi aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa Berkelanjutan juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, mengingat bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional melibatkan beberapa sektor yang harus didukung oleh keterlibatan aktif seluruh OPD. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat koordinasi antar OPD untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan tanggung jawab bersama (Nugroho et al., 2019). Selain itu, dalam pemanfaatan kekuatan terhadap peluang dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu meningkatkan kolaborasi antara Bappeda dan pemerintah desa untuk memastikan sinkronisasi Road Maps SDGs Desa dengan RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi ini akan memastikan bahwa proyek dan program pembangunan desa sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh ([Fadillah et al., 2021](#)) menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan tidak hanya bermanfaat untuk pencapaian pembangunan tetapi juga meningkatkan kinerja pemerintah.

Mengidentifikasi dan memperluas kegiatan sebagai penguatan kegiatan yang mendorong pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan perlu pula untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Hal yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu pemerintah perlu untuk mendorong pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam infrastruktur dan layanan. Penelitian (Setiawan et al., 2022) menunjukkan bahwa inovasi dalam infrastruktur dan layanan publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan peran perempuan, pemerintah dapat menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Mengamati Peluang untuk Mengatasi Kelemahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional, dapat teratasi jika pemerintah dapat melihat peluang yang ada. Dari penelitian ini, telah diberikan

rekomendasi strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Strategi yang dapat dilakukan yakni:

a. Perancangan dan Penyusunan Regulasi Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa).

Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu untuk merencanakan dan menyusun regulasi lokal terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan. Melalui regulasi SDGs Desa, pemerintah Desa dapat memiliki kerangka hukum yang memungkinkan untuk mengadaptasi kebijakan global ke konteks lokal (Sitorus, 2020; Wijaya, 2019). Ini memastikan bahwa tujuan global diterjemahkan ke dalam tindakan yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk melakukan perancangan dan penyusunan regulasi tersebut, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan pendekatan yang telah terbukti efektif dalam berbagai studi untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lokal dengan tujuan pembangunan nasional (Sari & Setiawan, 2021).

b. Pengembangan Sistem Pengukuran Indikator Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)

Pengukuran yang efektif dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap indikator SDGs merupakan aspek krusial (Yuliani et al., 2021), karena hal ini memastikan bahwa kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dengan akurat dan transparan. Selain itu, pengukuran dan pemantauan yang baik meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Pengembangan sistem pengukuran indikator pembangunan desa berkelanjutan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli dan perwakilan dari masyarakat untuk merancang dan mengukur indikator ketercapaian SDGs Desa, dan melakukan pelatihan kepada aparat desa untuk meningkatkan pemahaman terkait pengukuran dan pemantauan indikator SDGs.

c. Penetapan *Leading Sector* untuk Mendorong Perubahan

Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama dengan organisasi perangkat daerah perlu mengidentifikasi sektor yang paling berpengaruh dalam pencapaian SDGs Desa. Menurut Situmorang & Udjianto (2024), kemajuan suatu daerah dalam pertumbuhan pembangunan dipicu oleh sektor unggulan (*leading sector*) yang mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup, sumber daya yang memadai, serta kebijakan yang mendukung sektor ini.

d. **Penyelarasan Periodesasi RPJMDes dengan Regulasi Pembangunan Desa Berkelanjutan**

Penyelarasan kebijakan dan perencanaan antara tingkat desa dengan kebijakan nasional atau global adalah kunci keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan/SDGs (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu mengajukan perubahan periodesasi RPJMDes agar lebih sesuai dengan regulasi pembangunan desa berkelanjutan yang telah diimplementasikan. Langkah ini didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan peningkatan keselarasan dan efektivitas implementasi (Anwar & Nugroho, 2021).

e. **Peningkatan Koordinasi Antar Pemerintah Daerah dan Desa**

Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan pemerintah desa sangat penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, penyelesaian masalah yang cepat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi rutin dengan mekanisme komunikasi yang efektif, sehingga kedua tingkat pemerintahan dapat saling mendukung dan berbagi informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Selain itu, koordinasi yang baik dapat memperkuat kapasitas lokal melalui bimbingan dan pelatihan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, implementasi pembangunan desa berkelanjutan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

f. **Perumusan Rencana Aksi SDGs Desa.**

Pemerintah Desa di Kabupaten Jeneponto perlu merumuskan rencana aksi SDGs Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, karena hal ini dapat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui rencana aksi, pemerintah desa dapat menetapkan prioritas pembangunan, memungkinkan pengukuran dan evaluasi kemajuan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penyusunan rencana aksi pembangunan desa berkelanjutan

harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga memastikan kebutuhan dan aspirasi warga desa terpenuhi, serta meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka.

Pemanfaatan Kekuatan untuk Menghadapi Tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional menjadi lebih efektif, dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan, dengan melaksanakan beberapa strategi yang ditemukan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Pembentukan Forum Komunikasi Terbuka

Pembentukan forum komunikasi dapat dijadikan sebagai wadah bagi Pemerintah Desa, organisasi perangkat daerah, Tim Evaluasi APBDes, dan masyarakat untuk bersinergi menetapkan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting. Ketika forum ini dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan dapat meminimalisir kepentingan politik dalam penetapan rencana pembangunan desa. Forum ini juga akan memungkinkan koordinasi yang lebih baik, mempercepat penyelesaian masalah, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa.

b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Peningkatan kapasitas kepala desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep keberlanjutan, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengimplementasikan program-program yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kepala desa yang terlatih akan mampu mengadopsi inovasi dan teknologi informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengatasi konflik dengan lebih baik. Hal ini berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan

c. Pengembangan BUMDes

Terkait dengan permasalahan anggaran yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto, pemerintah dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut penelitian ([Permatasari, 2021](#)) BUMDes yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs 1 sampai 8. Pengembangan BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan tambahan

bagi desa, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan desa berkelanjutan secara lebih efektif.

d. Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa

Pemerintah desa di kabupaten Jeneponto ketika hanya mengandalkan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan. Diperlukan optimalisasi pengeolaan kekayaan aset desa ([Widyawati et al., 2022](#)). Pemerintah Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat memberikan himbaun dan menggerakkan pemerintah desa agar melakukan identifikasi dan inventarisasi aset desa, agar dapat dikelola guna meningkatkan sumber pendapatan desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Mengatasi segala Kelemahan dan Ancaman dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat melakukan dua strategi. Pertama yaitu penerapan sistem pengawasan transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran pembangunan. Pada strategi ini pemerintah perlu untuk melibatkan lembaga independent dan masyarakat dalam pengawasan anggaran pembangunan desa. Strategi selanjutnya yaitu pemerintah perlu untuk menciptakan mekanisme independen untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan di desa, dengan memperkuat pasrtisipasi masyarakat, mendorong transparansi dan menetapkan aturan yang menghindari kepentingan politis. Dalam melakukan mekanisme independent tersebut pemerintah dapat mengacu pada pelaksanaan program *Open Government Indonesia* (OGI). Pada program tersebut mencakup berbagai inisiatif, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme independen ini juga dapat membantu untuk menjamin pemerintah desa untuk melaksanakan program- program yang telah ditetapkan, seperti dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun.

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Strategi-strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan pendampingan pembuatan RPJMDes, optimalisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan partisipasi aktif OPD, sinkronisasi Road Map SDGs Desa dengan RPJMD Kabupaten, serta penguatan kegiatan yang mendorong SDGs Desa. Selain itu, direkomendasikan pula penyusunan regulasi SDGs Desa, pengembangan sistem pengukuran indikator SDGs Desa, penetapan leading sector, penyelarasan periodisasi RPJMDes dengan regulasi SDGs Desa, peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan desa, perumusan rencana aksi SDGs Desa, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan data yang hanya berasal dari satu kabupaten, yaitu Kabupaten Jeneponto, sehingga temuan ini mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, kajian ini juga menghadapi kendala dalam pengumpulan data yang dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan pembangunan desa serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa terkait pelaksanaan SDGs Desa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi ke daerah-daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan di berbagai konteks. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak konkret dari strategi-strategi yang diimplementasikan dalam jangka panjang untuk melihat efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya juga bisa fokus pada pengembangan metode evaluasi yang lebih efektif dan inovatif untuk mengukur ketercapaian indikator pembangunan desa berkelanjutan secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allawi, A. H., & Al-Jazaeri, H. M. J. (2023). [A new approach towards the sustainability of urban-rural integration: The development strategy for central villages in the Abbasiya District of Iraq using GIS techniques](#). *Regional Sustainability*, 4(1), 28–43. <https://doi.org/10.1016/J.REGSUS.2023.02.004> (2) (3) (4)
- Beata, S., Malgorzata, P. R., & Bartkus, C. (2023). [The role of education in the economics of sustainable development](#). *Procedia Computer Science*, 225, 4177–4186. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.414>
- Ben-David, S., Blitzer, J., Crammer, K., Kulesza, A., Pereira, F., & Vaughan, J. W. (2010). [A theory of learning from different domains](#). *Machine Learning*, 79, 151–175. (2)
- Cole, M. J., & Broadhurst, J. L. (2021). [Measuring the sustainable development goals \(SDGs\) in mining host communities: A South African case study](#). *Extractive Industries and Society*, 8(1), 233–243. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.11.012>
- Creswell, J. W. (2019). [Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran](#). Pustaka Pelajar.
- David Fred, R., & Forest, D. (2016). [Manajemen Strategik: Suatu pendekatan Keunggulan Bersaing–Konsep](#). Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Fadillah, A. Y., Aziza, N., & Martiah, L. (2021). [Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah](#). *Jurnal Fairness*, 10(1), 63–78. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i1.15237>
- Ghali, R. A. A., & Ali, A. H. S. (2022). [Development of rural villages as new sustainable urban centers Al-Bassamiya City Center “A case study.” AIP Conference Proceedings](#), 2437(1). (2)
- Iskandar, A. H. (2020). [SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan](#). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2)
- Li, X., Ma, L., Ruman, A. M., Iqbal, N., & Strielkowski, W. (2023). [Impact of natural resource mining on sustainable economic development: The role of education and green innovation in China](#). *Geoscience Frontiers*, 15(3), 101703. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101703>
- Li, Y., Fan, P., & Liu, Y. (2019). [What makes better village development in traditional agricultural areas of China? Evidence from long-term observation of typical villages](#). *Habitat International*, 83, 111–124. <https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2018.11.006>
- Li, Y., He, J., Yue, Q., Kong, X., & Zhang, M. (2022). [Linking rural settlements optimization with village development stages: A life cycle perspective](#). *Habitat International*, 130, 102696. <https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2022.102696>
- Liu, Y. (2018). [Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China](#). *Dili Xuebao/Acta Geographica Sinica*, 73(4), 637–650. <https://doi.org/10.11821/dlxb201804004> (2)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). [Qualitative data analysis: A methods](#)

- [sourcebook](#). Sage publications.
- Nishitani, K., Nguyen, T. B. H., Trinh, T. Q., Wu, Q., & Kokubu, K. (2021). [Are corporate environmental activities to meet sustainable development goals \(SDGs\) simply greenwashing? An empirical study of environmental management control systems in Vietnamese companies from the stakeholder management perspective](#). *Journal of Environmental Management*, 296(July). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113364>
- Ozturk, I., Alqassimi, O., & Ullah, S. (2024). [Digitalization and SMEs development in the context of sustainable development: A China perspective](#). *Heliyon*, 10(6), e27936. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27936>
- Permatasari, P. (2021). [The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals](#). *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Saleh, A. (2016). [Concept of Village Regrouping as an Alternative Strategy for Sustainable Micro Regional Development](#). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216, 933–937. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.12.090>
- Wang, T., An, M., Huang, S., Xiong, L., & Li, J. (2020). [Analysis of Sustainable Development of Chinese Villages-Take the Design of XiangFeng Pastoral Complex in Guangzhou as an Example](#). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 546(3). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/546/3/032001>
- Widyawati, Yusuf, N. R., & Sulmiah. (2022). [Analysis of Village Resources in Realizing Sustainable Village Development : A Case Study of Bontorappo Village , Arungkeke Village And Pattiro Village , Jeneponto Regency , South Sulawesi](#). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 12(2), 439–449. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/38378/18283> (2)
- Wood, D., Rathnasabapathy, M., Stober, K. J., & Menon, P. (2024). [Challenges and progress in applying space technology in support of the sustainable development goals](#). *Acta Astronautica*, 219(March), 678–692. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2024.03.064>
- Zang, Y., Liu, Y., Yang, Y., Woods, M., & Fois, F. (2020). [Rural decline or restructuring? Implications for sustainability transitions in rural China](#). *Land Use Policy*, 94, 104531. <https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2020.104531> (2)